

BAB I

PENDAHULUAN

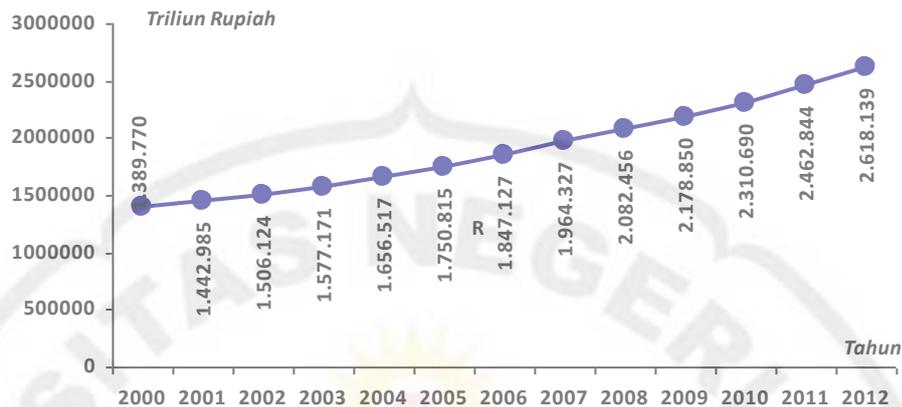
1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini ditandai dengan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara. Indonesia mengikuti perkembangan tersebut melalui serangkaian deregulasi keuangan dan perbankan yang di mulai tahun 1983. Implikasi dari deregulasi tersebut adalah semakin meningkatnya integrasi dan interaksi antar berbagai unsur ekonomi yang menyebabkan struktur ekonomi menjadi dinamis dan kompleks. Struktur ekonomi yang kompleks akan merubah perilaku pelaku ekonomi yang diindikasikan dengan munculnya berbagai fenomena yang relatif baru bagi perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi baik milik warga negara maupun milik penduduk negara lain yang berada di negara tersebut. PDB dapat dinilai menurut harga pasar atau harga yang berlaku dan harga tetap atau harga konstan (Sukirno,2004:35).

Berikut disajikan grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB berdasarkan harga konstan selama tahun 2000-2012.

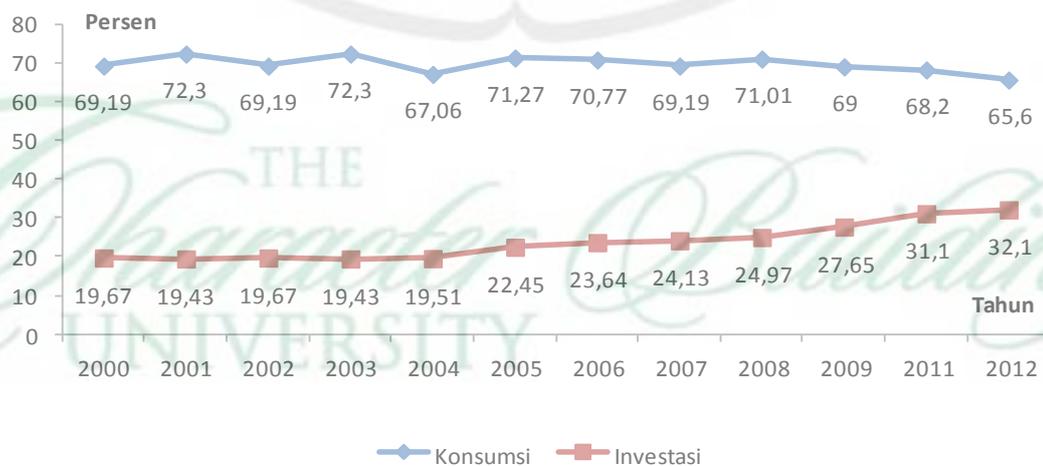


Sumber: Bank Indonesia, (2012) diolah

Gambar 1.1. Perkembangan PDB Indonesia Dari Tahun 2000– 2012 (Dalam Triliun Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1. diatas dapat dilihat bahwa kenaikan PDB sangat berfluktuasi, dimana jumlah PDB pada tahun 2000 adalah Rp. 1.389.770 triliun dan jumlah ini terus mengalami kenaikan, hingga di tahun 2012 jumlah tersebut bertambah menjadi Rp. 2.618.139 triliun.

Kuncoro (2004:67) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi yang juga merupakan faktor penggerak pertumbuhan. Sebagai pembuktian dari pendapat tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:



Sumber: Bank Indonesia, (2012) diolah

Gambar 1.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Atas PDB

Berdasarkan gambar 1.2. diatas terlihat bahwa komponen penyumbang PDB lebih besar konsumsi daripada investasi. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia lambat. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat membantu penyerapan tenaga kerja sehingga angka pengangguran pun dapat dikurangi (Kuncoro, 2004;123).

Perkembangan PDB ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Alat pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalan atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui Anggaran Belanja Negara atau APBN yang merupakan acuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.

Kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tabel berikut memuat perkembangan pengeluaran pemerintah

pusat dari tahun 2001 sampai dengan 2010 (dalam miliar rupiah) sebagai cerminan perkembangan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah.

Tabel 1.1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dari Tahun 2001 Sampai Dengan 2010 (Dalam Miliar Rupiah)

| Tahun | Belanja Pemerintah Pusat | Belanja Pemerintah Daerah | Total Belanja Negara |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 2001 | 260.500 | 81.100 | 341.600 |
| 2002 | 224.000 | 98.200 | 322.200 |
| 2003 | 258.100 | 120.700 | 378.800 |
| 2004 | 255.300 | 119.000 | 374.400 |
| 2005 | 364.100 | 177.800 | 511.900 |
| 2006 | 478.300 | 220.800 | 699.100 |
| 2007 | 498.172 | 254.201 | 752.373 |
| 2008 | 655.649 | 366.951 | 1.022.600 |
| 2009 | 716.367 | 412.413 | 1.128.780 |
| 2010 | 699.688 | 443.565 | 1.143.253 |

Sumber: Bank Indonesia, (2012) diolah

Dari data yang terdapat pada tabel 1.1. dapat disimpulkan perkembangan pengeluaran pemerintah senantiasa terus meningkat baik pengeluaran pemerintah pusat maupun pengeluaran pemerintah daerah. Dari peningkatan jumlah belanja pemerintah tersebut diketahui bahwa pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan fiskal secara ekspansif (kebijakan fiskal berupa penambahan pengeluaran Negara atau pengurangan pajak). Sasaran dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah peningkatan PDB dan memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran. Kebijakan ekspansif akan mengurangi tingkat pengangguran karena setiap pengeluaran pemerintah akan diusahakan untuk

pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja, disisi lain pengurangan pajak akan meningkatkan investasi karena biaya investasi berkurang, seperti yang terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Investasi Dan Pajak Di Indonesia Selama Tahun 2001 – 2010

| Tahun | Investasi (Keseluruhan) (milyar rupiah) | Pajak (Milyar rupiah) |
|-------|--|--------------------------|
| 2001 | 293.792,70 | 185.541 |
| 2002 | 307.584,60 | 210.088 |
| 2003 | 309.431,05 | 242.048 |
| 2004 | 354.856,74 | 280.559 |
| 2005 | 393.500,50 | 346.997 |
| 2006 | 403.719,24 | 409.055 |
| 2007 | 441.614,01 | 491.835 |
| 2008 | 493.222,49 | 658.667 |
| 2009 | 523.455,22 | 725.843 |
| 2010 | 565.733,42 | 729.165 |

Sumber: Bank Indonesia, (2012) diolah

Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui Bank Indonesia. Indikator yang dapat menilai kebijakan moneter tersebut dapat berupa: inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar dan nilai tukar. Inflasi yang tinggi akan menimbulkan kesulitan bagi Bank untuk mengerahkan dana masyarakat, karena dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga riil (bunga nominal-inflasi) akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan. Hal ini akan membuat perbankan kekurangan

dana dari masyarakat yang berarti penyediaan dana bagi investasi juga berkurang akibatnya laju pertumbuhan ekonomi akan lambat. Nilai tukar yang tidak stabil juga akan mempengaruhi pelaku usaha dan perbankan. Untuk itu pemerintah melalui otoritas moneter dapat melakukan berbagai strategi kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Misalnya metode penambahan uang dalam ekonomi akan menimbulkan permasalahan meningkatnya tingkat harga barang dan jasa, sehingga menyebabkan peningkatan inflasi. Pembiayaan defisit anggaran dengan cara penambahan jumlah uang beredar juga akan memiliki dampak pada peningkatan permintaan uang oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai uang dalam ekonomi, dengan kata lain, masyarakat perlu menambah uang untuk pengeluarannya.

Dengan demikian, pembiayaan defisit anggaran oleh pemerintah dengan cara menambahkan uang dalam ekonomi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pemerintah (Mankiw, 2006:274), sedangkan dalam teori Keynes menjelaskan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh suku bunga, harga, dan kuantitas barang. Permintaan uang naik maka investasi akan berkurang, apabila investasi berkurang maka akan mengakibatkan permintaan agregat berkurang. Pada akhirnya kenaikan permintaan agregat pada *first cycle* dan berkurangnya permintaan agregat pada *second cycle* akan mencapai posisi keseimbangan baru secara bersama-sama.

Berikut disajikan tabel 1.3 yang memuat indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai cerminan kebijakan moneter mulai tahun 2001 sampai dengan 2010.

Tabel 1.3. Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bulan, Dan Nilai Tukar Periode Tahun 2001 - 2010

| Tahun | M1 (milyar Rupiah) | M2 (milyar Rupiah) | Tingkat Suku Bunga SBI 3 Bln (%) | Nilai Tukar Rata-rata Rp/ US \$ |
|-------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 2001 | 177.731 | 844.053 | 17,62 | 10.348 |
| 2002 | 191.939 | 883.908 | 19,93 | 8.895 |
| 2003 | 213.784 | 944.366 | 8,31 | 8.423 |
| 2004 | 245.946 | 1.033.877 | 7,43 | 9.119 |
| 2005 | 271.140 | 1.202.762 | 12,74 | 9.781 |
| 2006 | 347.013 | 1.382.493 | 9,75 | 8.975 |
| 2007 | 450.055 | 1.649.662 | 8,00 | 9.372 |
| 2008 | 456.787 | 1.895.839 | 10,83 | 10.895 |
| 2009 | 515.824 | 2.141.384 | 6,46 | 9.353 |
| 2010 | 605.411 | 2.471.206 | 6,26 | 8.959 |

Sumber: Bank Indonesia, dan BPS (2012) diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan moneter longgar (*easy monetary policy*) yaitu dengan menggiatkan kembali perekonomian yang sedang lesu, dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang beredar, agar permintaan konsumsi naik yang secara otomatis juga akan menaikkan produksi.

Dalam perekonomian terbuka dan sistem devisa bebas, kebijakan moneter yang longgar dapat berdampak pada kenaikan harga/inflasi dan mengurangi daya saing produk dalam negeri dan pada akhirnya akan menurunkan devisa. Sementara itu, kebijakan moneter ketat akan memberi dampak sebaliknya, terutama dalam rangka meredam kenaikan harga atau inflasi yang berlebihan,

sehingga tekanan terhadap neraca pembayaran berkurang karena produk dalam negeri kembali dapat bersaing, meskipun dengan kebijakan ini akan berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, karena jumlah uang yang beredar dikurangi, yang berarti permintaan juga berkurang.

Krisis ekonomi memberi pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa beberapa indikator-indikator ekonomi makro yang memuaskan belum menjadi jaminan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memang kuat. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an pilihan kebijakan ekonomi untuk menstabilisasi perekonomian adalah kebijakan fiskal dan moneter. Pada saat ekonomi dirasakan berjalan terlalu lambat dari yang seharusnya yang ditandai dengan rendahnya pertumbuhan dan tingginya tingkat pengangguran, maka dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan. Sedangkan pada saat perekonomian dianggap terlalu laju yang ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi dan tingkat inflasi yang juga tinggi, kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat menekan dan mengarahkan perekonomian agar terhindar dari dampak negatif.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan makroekonomi yang memiliki target yang harus dicapai baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sudah lama terjadi perdebatan antara kebijakan fiskal dan moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian target menjaga stabilitas tingkat harga. Sementara itu disisi lain kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian yang menyebabkan munculnya *trade-off* antara pencapaian stabilitas

harga dan pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Kebijakan defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, sebaliknya perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi juga memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam pengambilan kebijakan makroekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Berdasarkan kondisi dan fenomena dalam perekonomian Indonesia, Penulis tertarik untuk membuat sebuah studi yang penulis tuangkan dalam sebuah tulisan dengan judul “Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia:”

1. 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah :

Bagaimanakah Dampak Kebijakan Fiskal pada variabel Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak, Ekspor, Nilai Tukar dan Kebijakan Moneter pada variabel Jumlah Uang beredar, Suku Bunga, terhadap peningkatan PDB Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Menganalisis dampak Kebijakan Fiskal pada variabel Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pajak, Ekspor, Nilai Tukar dan Kebijakan Moneter pada variabel Jumlah Uang beredar, Suku Bunga, terhadap peningkatan PDB Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen dan peneliti lainnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya